Konten dari Pengguna

Pahlawan di Tengah Krisis: Menyelamatkan Indonesia dari Kehilangan Arah



Bernardus Agus Rukiyanto
Dosen Teologi Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik, Universitas Sanata Dharma. Lulusan S...

Ikuti kumparan di Google

15 November 2026 20:00 WIB · waktu baca 8 menit

0 0

Tulisan dari Bernardus Agus Rukiyanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia kembali mengenang keberanian para pejuang yang mempertaruhkan nyawa dalam Pertempuran Surabaya 1945. Mereka bukan sekadar mempertahankan wilayah, melainkan mempertahankan kehormatan, kedaulatan, dan masa depan sebuah bangsa yang baru saja memproklamasikan kemerdekaannya. Bagi mereka, kemerdekaan bukan hadiah yang dapat dinikmati tanpa pengorbanan, melainkan amanah yang harus diperjuangkan.



Sumber: Chatgpt

Delapan puluh satu tahun kemudian, Indonesia memang tidak lagi menghadapi penjajahan dalam bentuk kolonialisme fisik. Bendera Merah Putih berkibar, pemerintahan berjalan, pemilihan umum dilaksanakan, dan pembangunan terus diklaim sebagai agenda nasional. Namun, pertanyaan yang patut diajukan pada peringatan Hari Pahlawan 2026 adalah: apakah bangsa ini benar-benar telah merdeka dari berbagai persoalan yang menghambat terwujudnya cita-cita kemerdekaan?

Pertanyaan tersebut penting karena Indonesia sedang menghadapi sejumlah persoalan yang tidak sederhana. Persoalan integritas penyelenggaraan negara, korupsi, ketimpangan ekonomi, tekanan biaya hidup, persoalan ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, hingga menurunnya kepercayaan terhadap institusi publik menjadi tantangan yang harus dihadapi secara serius.

Di tengah situasi tersebut, makna kepahlawanan perlu direnungkan kembali. Jangan sampai Hari Pahlawan hanya menjadi agenda tahunan yang dipenuhi upacara, pidato, tabur bunga, dan slogan patriotisme, tetapi kehilangan relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kemerdekaan belum selesai diperjuangkan

Sejarah 10 November 1945 mengajarkan bahwa kemerdekaan membutuhkan keberanian untuk menghadapi ketidakadilan dan kesediaan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Para pejuang tidak berjuang demi jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun keuntungan kelompok. Mereka berjuang karena memiliki keyakinan bahwa bangsa ini berhak menentukan nasibnya sendiri.

Namun, delapan dekade setelah kemerdekaan, kita justru masih berhadapan dengan persoalan mendasar mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan dan untuk siapa pembangunan diselenggarakan.

Korupsi, penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, dan praktik politik transaksional merupakan bentuk persoalan yang menggerogoti cita-cita kemerdekaan dari dalam. Ketika jabatan publik lebih dipandang sebagai sumber keuntungan daripada amanah, ketika kebijakan lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada masyarakat luas, dan ketika kepentingan politik lebih dominan daripada kepentingan rakyat, sesungguhnya bangsa ini sedang menghadapi persoalan moral dalam mengelola kemerdekaan.

Kemerdekaan politik tidak otomatis menghasilkan kemerdekaan ekonomi dan keadilan sosial. Rakyat mungkin bebas memilih pemimpin, tetapi kebebasan tersebut belum sepenuhnya bermakna apabila sebagian masyarakat masih kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan berkualitas, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan hidup yang terjangkau.

Karena itu, perjuangan generasi sekarang tidak boleh berhenti pada mempertahankan simbol-simbol kemerdekaan. Perjuangan harus diarahkan pada memastikan bahwa kemerdekaan benar-benar menghasilkan kesejahteraan, keadilan, dan martabat manusia.

Krisis kepercayaan dan ujian integritas negara

Salah satu persoalan paling serius dalam kehidupan berbangsa saat ini adalah krisis kepercayaan terhadap institusi publik. Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan negara. Tanpa kepercayaan, kebijakan pemerintah akan sulit memperoleh legitimasi, penegakan hukum akan dipertanyakan, dan hubungan antara negara dengan masyarakat akan semakin berjarak.

Berbagai kontroversi tata kelola kekuasaan, termasuk dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi kepolisian dan tokoh-tokoh negara, memperlihatkan betapa pentingnya pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara. Dugaan tersebut harus diselesaikan melalui proses hukum yang transparan dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Namun, perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa tidak boleh ada institusi atau pejabat yang berada di luar jangkauan hukum.

Negara yang kuat bukanlah negara yang aparatnya memiliki kekuasaan tanpa batas, melainkan negara yang mampu memastikan setiap kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.

Krisis kepercayaan tidak dapat diselesaikan hanya dengan komunikasi politik, pencitraan, atau kampanye keberhasilan pembangunan, melainkan membutuhkan tindakan nyata: penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi yang konsisten, transparansi kebijakan, serta keteladanan para pemimpin.

Di sinilah kita perlu membedakan antara nasionalisme yang bersifat simbolik dan nasionalisme yang substantif. Nasionalisme simbolik mudah ditampilkan melalui upacara dan slogan. Nasionalisme substantif justru diuji ketika seseorang harus memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik.

Pertumbuhan ekonomi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan

Persoalan berikutnya adalah tantangan ekonomi dan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2026 tercatat mencapai 5,47 persen secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian masih memiliki daya tahan dan potensi pertumbuhan.

> Namun, angka pertumbuhan makroekonomi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan. Pertanyaan yang lebih penting adalah siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut dan sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

> Apabila pertumbuhan ekonomi berjalan bersamaan dengan tekanan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, ketimpangan kesempatan, dan lemahnya perlindungan pekerja, maka pembangunan perlu dievaluasi secara lebih mendalam.

Kita tidak boleh membiarkan keberhasilan statistik menutupi persoalan yang dihadapi rumah tangga. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keberhasilan pembangunan bukan terutama ditentukan oleh angka pertumbuhan produk domestik bruto, melainkan oleh kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, membiayai pendidikan anak, memperoleh pelayanan kesehatan, dan memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak.

Pahlawan masa kini juga harus dimaknai melalui perjuangan menghadirkan keadilan ekonomi. Petani yang menjaga ketahanan pangan, nelayan yang mempertahankan kehidupan pesisir, buruh yang memperjuangkan kesejahteraan, serta pelaku UMKM yang menciptakan lapangan pekerjaan merupakan bagian dari kekuatan bangsa yang tidak boleh diabaikan.

Mereka mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah sebagai pahlawan nasional, tetapi kontribusinya menentukan keberlangsungan kehidupan masyarakat.

Pahlawan lingkungan dan generasi masa depan

Indonesia juga menghadapi tantangan ekologis yang semakin mendesak. Kebakaran hutan dan lahan, kerusakan ekosistem, pencemaran, deforestasi, serta ancaman perubahan iklim bukan sekadar persoalan lingkungan. Semuanya berkaitan langsung dengan keberlanjutan ekonomi, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan masa depan generasi berikutnya.



Sumber: Chatgpt

Dalam konteks ini, kepahlawanan perlu diperluas menjadi keberanian melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab.

Pahlawan lingkungan adalah mereka yang menjaga hutan, melindungi kawasan pesisir, mempertahankan sumber air, dan memperjuangkan pembangunan yang tidak mengorbankan generasi mendatang. Mereka juga adalah masyarakat lokal yang mempertahankan ruang hidupnya secara bertanggung jawab.

Pembangunan yang mengabaikan daya dukung lingkungan sesungguhnya sedang memindahkan beban persoalan kepada generasi berikutnya. Karena itu, membela lingkungan bukan tindakan yang bertentangan dengan pembangunan. Justru, itulah bagian dari perjuangan membangun Indonesia yang berkelanjutan.

Pahlawan tidak harus menunggu gelar negara

Ada kecenderungan masyarakat memahami pahlawan hanya sebagai sosok yang memperoleh pengakuan resmi negara. Padahal, kepahlawanan tidak selalu membutuhkan gelar, penghargaan, atau pengakuan formal.

Seorang guru yang tetap mengajar dengan integritas di tengah keterbatasan adalah pahlawan. Seorang tenaga kesehatan yang bekerja melayani masyarakat dengan tulus adalah pahlawan. Seorang peneliti yang menghasilkan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan bangsa adalah pahlawan. Seorang jurnalis yang mempertahankan independensi dan kebenaran adalah pahlawan. Begitu pula seorang aparatur negara yang menolak korupsi meskipun menghadapi tekanan.

Kepahlawanan sesungguhnya terletak pada keberanian melakukan hal yang benar ketika terdapat kesempatan untuk melakukan sebaliknya.

Dalam kehidupan demokrasi, bahkan keberanian masyarakat menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang tidak adil merupakan bagian dari kontribusi kebangsaan. Kritik tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman terhadap negara. Kritik yang bertanggung jawab justru diperlukan untuk memastikan kekuasaan tidak kehilangan arah.

Bangsa yang sehat bukan bangsa yang seluruh warganya selalu sepakat dengan pemerintah, melainkan bangsa yang mampu mengelola perbedaan secara dewasa, menghormati hukum, dan menempatkan kepentingan bersama di atas pertentangan kelompok.

Melangkah bersama, tetapi ke arah mana?

Tema Hari Pahlawan 2026, "Pahlawanku Teladanku: Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", mengandung pesan penting tentang keteladanan, persatuan, dan keberlanjutan perjuangan. Namun, pesan tersebut perlu diterjemahkan menjadi agenda nyata, bukan berhenti sebagai rangkaian kata yang indah.

Melangkah bersama membutuhkan arah yang jelas. Pemerintah harus menunjukkan keteladanan melalui integritas dan keberpihakan kepada rakyat. Aparat penegak hukum harus menjunjung keadilan tanpa diskriminasi. Dunia usaha harus menciptakan pertumbuhan yang bertanggung jawab. Perguruan tinggi harus menghasilkan ilmu pengetahuan dan inovasi yang menjawab persoalan masyarakat. Sementara itu, masyarakat sipil harus terus menjaga ruang demokrasi dan mengawasi jalannya pemerintahan.

Generasi muda juga perlu diberi ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam pembangunan, bukan sekadar dijadikan objek kampanye tentang masa depan bangsa. Mereka membutuhkan pendidikan yang berkualitas, kesempatan kerja, akses terhadap teknologi, ruang inovasi, serta jaminan bahwa masa depan mereka tidak dikorbankan oleh keputusan jangka pendek para pemegang kekuasaan.

Perjuangan melanjutkan kemerdekaan harus diwujudkan melalui setidaknya tiga agenda besar: memperkuat integritas dan supremasi hukum, menghadirkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta memastikan keberlanjutan lingkungan dan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga agenda tersebut membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat dalam kewenangan, tetapi juga kuat dalam keteladanan.

Mengembalikan makna kepahlawanan

Pada akhirnya, Hari Pahlawan 10 November 2026 seharusnya menjadi momentum untuk bercermin sebagai bangsa. Kita tidak cukup hanya bertanya siapa pahlawan yang harus dikenang, tetapi juga harus bertanya apakah nilai-nilai kepahlawanan masih hidup dalam cara kita mengelola negara dan memperlakukan sesama.

Jangan sampai kita begitu fasih menyebut nama para pahlawan, tetapi abai terhadap nilai perjuangan yang mereka wariskan. Jangan sampai kita mengibarkan bendera dengan penuh kebanggaan, tetapi membiarkan ketidakadilan terus berlangsung. Jangan sampai kita berbicara tentang persatuan, tetapi membiarkan kepentingan kelompok merusak kepentingan bangsa.

Para pahlawan telah mewariskan kemerdekaan. Tanggung jawab generasi sekarang adalah memastikan kemerdekaan itu tidak kehilangan makna.

Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang bekerja keras. Indonesia juga tidak kekurangan sumber daya dan potensi. Yang masih harus terus diperjuangkan adalah integritas dalam kekuasaan, keadilan dalam pembangunan, keberanian dalam menegakkan kebenaran, dan keteladanan dalam kehidupan publik.

Mungkin inilah makna kepahlawanan yang paling relevan saat ini: tidak harus mengangkat senjata untuk membela Indonesia, tetapi harus memiliki keberanian melawan korupsi, ketidakadilan, kebodohan, kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Sebab, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dari luar. Terkadang, ancaman terbesar justru muncul ketika orang-orang yang diberi amanah untuk membangun negeri kehilangan integritas dan melupakan tujuan kemerdekaan.

Pahlawan telah berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kini, tugas kita adalah memastikan Indonesia tidak kehilangan cita-cita kemerdekaannya.

Hari Pahlawan

Laporkan tulisan

Tim Editor